

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Walikota Bukittinggi mendapat Piagam penghargaan Walikota *Entrepreneur Award* 2018 dalam bidang pendidikan pada acara Penganugerahan *Innovation Network of Asia Entrepreneur Award* 2018 (*INA Entrepreneur Award* 2018) yang diadakan oleh *Philip Kotler Center for ASEAN Marketing* (PK CAM) bekerja sama dengan *Internasional Council for Small Business* (ICBS) pada Rabu, 5 Desember 2018. Penilaian Penganugerahan *INA Entrepreneur Award* 2018 dilatarbelakangi oleh pentingnya transformasi dalam rangka menjadikan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah agar lebih adaptif terhadap perubahan dengan paradigma pemimpin yang inovatif, kreatif dan berjiwa kewirausahaan. Untuk proses seleksi dan penilaian, PK CAM bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).¹

Penghargaan yang diterima Walikota Bukittinggi merupakan buah kerja keras dan pemikirannya bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Yesi Endriani Ramlan dalam membuat terobosan kebijakan untuk menangani penurunan kualitas keluarga melalui program Sekolah Keluarga. Program ini hadir untuk menyelamatkan keluarga dari permasalahannya serta untuk meningkatkan kapasitas orangtua untuk mengurus

¹ Kaba12.com. 2018, 7 Desember. *Lahirkan Terobosan Sekolah Keluarga Ramlan Nurmatias Dianugerahi Walikota Entrepreneur Award 2018*. (<https://kaba12.co.id>), diakses pada 29 November 2019.

rumah tangga dan mendidik anak-anaknya.² Gagasan pendirian Sekolah Keluarga sendiri berawal dari keresahan terhadap permasalahan sosial yang terjadi di Kota Bukittinggi. Berikut adalah permasalahan sosial yang terjadi di Kota Bukittinggi pada tahun 2017 yang terdata oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) dari beberapa instansi layanan masyarakat:³

Tabel 1.1 Permasalahan Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2017

No.	Masalah	Tahun 2017
1.	Kasus <i>Human Immunodeficiency Virus (HIV) / Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)</i>	71 kasus
2.	Kekerasan pada perempuan dan anak	48 kasus
3.	Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)	59 orang
4.	Lelaki Suka Lelaki (LSL) yang ke pelayanan kesehatan	48 orang
5.	Perceraian suami isteri	576 perkara
6.	<i>Stunting</i>	24,4%

sumber: Dokumen Inovasi Pelayanan Publik “Kolega Sehati” dan Data DP3APPKB

Persoalan-persoalan sosial pada Tabel 1.1 lah yang mendapat perhatian Yesi Ramlan Nurmatias selaku Ketua TP PKK sekaligus sebagai Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bukittinggi, sehingga timbul gagasan untuk berupaya memperbaiki persoalan utama penyebab timbulnya masalah di atas melalui wadah yang diberi nama Sekolah Keluarga Sejahtera Menanti disingkat dengan Kolega Sehati atau lebih sering disebut Sekolah Keluarga. Menurut Dinas P3APPKB, beberapa permasalahan yang menjadi penyebab utama terjadinya persoalan sosial pada

²*Ibid.*

³Dokumen Inovasi Pelayanan Publik “Kolega Sehati”, 2019, hlm. 1.

Tabel 1.1 diantaranya adalah berkurangnya peranan keluarga dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera, di samping itu ketidakbijakan dalam penggunaan teknologi juga sangat mempengaruhi pola berfikir masyarakat khususnya generasi muda, sehingga terjadi pergeseran tata nilai yang mengakibatkan nilai moral, adat dan budaya ikut bergeser⁴. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting di dalam lingkungan, masyarakat dan bangsa. Di Indonesia sendiri pembangunan keluarga diamanatkan dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan bathin.⁵

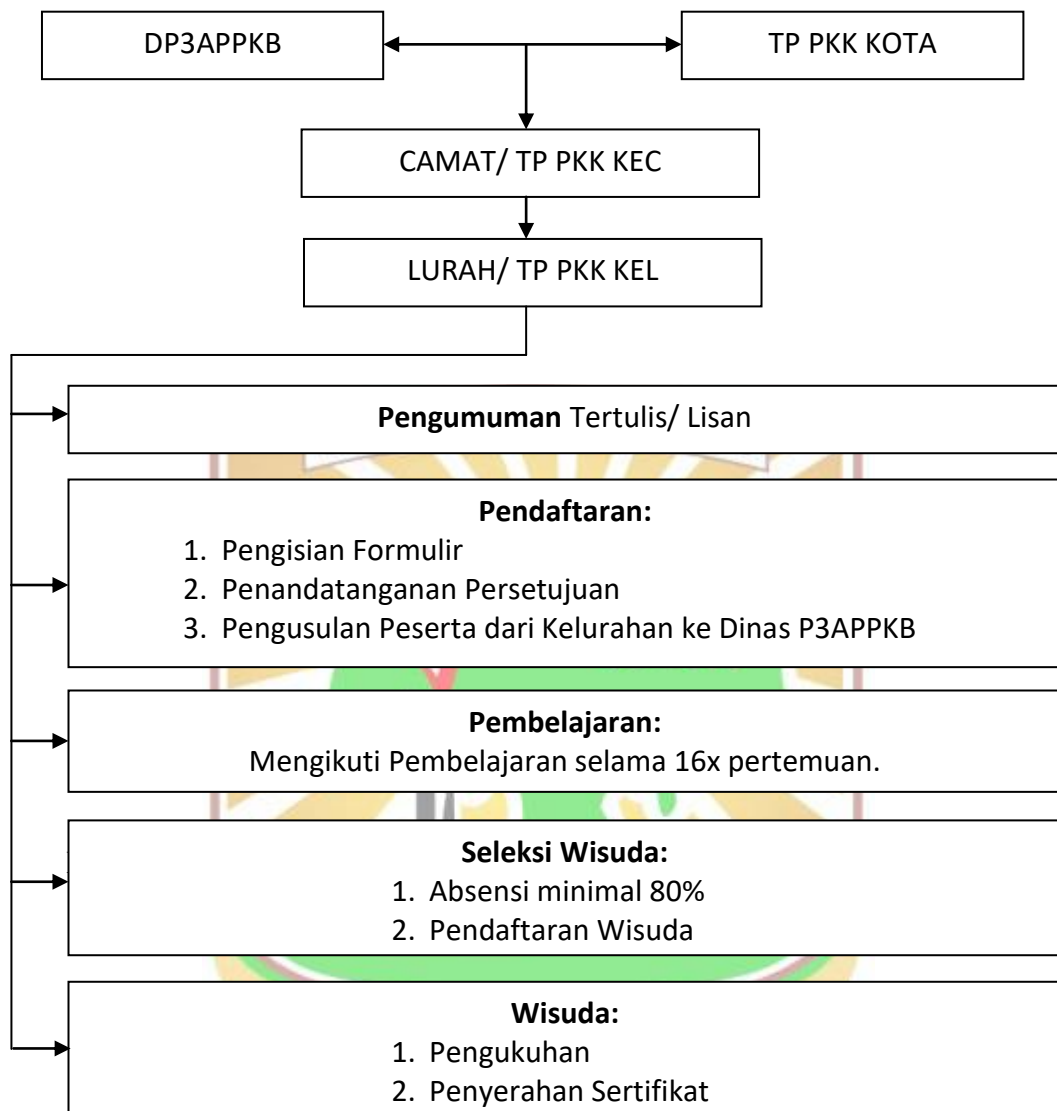
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias menjelaskan Sekolah Keluarga tidak sama dengan sekolah biasa, karena Sekolah Keluarga tidak membangun gedung baru dan tidak ada kepala sekolahnya. Seluruh kantor lurah di Kota Bukittinggi bisa diberdayakan menjadi Sekolah Keluarga. Masing-masing kantor lurah memiliki banyak ruangan, seperti aula dan sebagainya, ruangan-ruangan itu yang akan digunakan sebagai ruang belajar Sekolah Keluarga. Dalam Sekolah Keluarga ini guru-guru berasal dari berbagai kalangan, baik dari tim pendidik, tim medis, bundo kandung, polisi, psikolog, ulama dan sebagainya.⁶

⁴Dokumen *Story Telling* Sekolah Keluarga, 2018.

⁵*Ibid.*

⁶Klikpositif.com. 2018, 25 Februari. *TP PKK Bukittinggi akan Bangun Sekolah Keluarga, Apa Itu?* (<http://news.klikpositif.com>), diakses pada 29 November 2019.

Gambar 1.1 Mekanisme Pelaksanaan Sekolah Keluarga



sumber: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sekolah Keluarga Angkatan II Tahun 2019

Pelaksanaan Program Sekolah Keluarga secara umum dimulai dari pemilihan kelurahan yang akan dijadikan tempat pelaksanaan Sekolah Keluarga melalui rapat OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait. Untuk pemilihan kelurahan, diutamakan kelurahan dengan volume permasalahan sosial yang tinggi dan/atau daerah yang menaruh minat dan siap mendukung program ini. Dalam hal ini lebih diprioritaskan kelurahan yang ditetapkan sebagai Kampung Keluarga

Berencana (Kampung KB). Yang mana kriteria wilayah Kampung KB sendiri setidaknya sebagai berikut: (1) Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-rata, (2) wilayah; kumuh, miskin, kawasan wisata, padat penduduk, (3) angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah.

Hasil rapat tersebut disampaikan kepada camat dan lurah yang bersangkutan sehubungan dengan dijadikannya daerah mereka sebagai lokasi pelaksanaan Sekolah Keluarga. Lalu kelurahan/TP PKK Kelurahan merekrut peserta merujuk pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sekolah Keluarga. Peserta Sekolah Keluarga diutamakan berasal dari keluarga rentan (baru menikah atau yang memiliki anak umur 0-18 tahun). Setelah itu, peserta yang diusulkan oleh kelurahan melalui proses seleksi dari Dinas P3APPKB dan terpilihlah peserta Sekolah Keluarga.

Tahap selanjutnya setelah terpilihnya peserta Sekolah Keluarga ialah pelaksanaan proses pembelajaran selama 16 (enam belas) kali pertemuan dengan materi 8 (delapan) fungsi keluarga (agama, sosial, cinta kasih, perlindungan, pendidikan, pelestarian lingkungan, reproduksi dan ekonomi). Materi-materi tersebut disampaikan oleh pengajar yang ahli dibidangnya, dalam hal ini Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi bekerjasama dengan instansi vertikal seperti: Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Kepolisian, Kejaksaan Tinggi, Poltekes, juga bekerja sama dengan organisasi profesi/ masyarakat seperti: LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau), bundo kanduang, komunitas peduli ASI (Air Susu Ibu), psikolog, OPD terkait: Dinas P3APPKB, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dll, juga tim *parenting* Yayasan Minang Peduli juga pengusaha-pengusaha sukses di Kota Bukittinggi. Setelah peserta memperoleh

pengetahuan dari Sekolah Keluarga sesuai jadwal yang telah ditetapkan, peserta nantinya akan diwisuda sebagai tanda telah menamatkan pembelajaran pada Sekolah Keluarga. Peserta yang berhak diwisuda adalah peserta yang memenuhi syarat wisuda berupa syarat kehadiran maupun syarat administratif lainnya sesuai yang diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sekolah Keluarga.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, Sekolah Keluarga muncul atas inisiatif Yesi Ramlan Nurmatias selaku Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Bukittinggi. TP PKK Bukittinggi menyampaikan ide pendirian Sekolah Keluarga dengan nama program “Kolega Sejati” ini kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) dan disambut baik oleh Kepala Dinas P3APPKB, karena program ini sangat menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas P3APPKB untuk pembentukan keluarga yang berkualitas yang tanggung jawabnya berada pada seksi Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan bidang Kualitas Keluarga (PUG PP bidang Kualitas Keluarga).⁷

Pada tahap berikutnya disepakatilah bahwa pelaksanaan Sekolah Keluarga atau Kolega Sejati ini dilaksanakan melalui kegiatan seksi PUG PP bidang Kualitas Keluarga.⁸ Dan diputuskan untuk mengujicobakan program ini pada 3 (tiga) kelurahan yang ada di Kota Bukittinggi, dengan jumlah peserta 30 (tiga puluh) orang per kelurahan. Dan kelurahan yang menjadi pilot proyek pelaksanaan Sekolah Keluarga pada tahun pertama (tahun 2018) ialah Kelurahan Puhun Tembok, Kelurahan Aur Kuning dan Kelurahan Aur Tajung Tang Tengah

⁷Dokumen Inovasi Pelayanan Publik, *op.cit.*, hlm 3.

⁸*Ibid.*

Sawah (ATTS). Berikut perkembangan pelaksanaan Sekolah Keluarga dari tahun awal pelaksanaan:

Tabel 1.2 Perkembangan Pelaksanaan Sekolah Keluarga

Tahun	2018	2019	*2020
Jumlah Peserta Sekolah Keluarga	90	360	720
Jumlah Peserta Sekolah Keluarga yang Diwisuda	84	312	
Keterangan	3 kelurahan	12 kelurahan	24 kelurahan

sumber: Olahan Peneliti

Inovasi Sekolah Keluarga berlanjut di tahun 2019 dan terus dilanjutkan di tahun berikutnya. Untuk tahun 2018 sudah dilaksanakan pada 3 (tiga) kelurahan sebagai pilot proyek dengan 90 (sembilan puluh) orang peserta, dan di tahun 2019 pada 12 (dua belas) kelurahan dengan 360 (tiga ratus enam puluh) peserta. Dan di tahun 2020 sedang dilaksanakan di seluruh kelurahan Kota Bukittinggi yakni di 24 (dua puluh empat) kelurahan yang ada di Kota Bukittinggi.

Pelaksanaan Sekolah Keluarga Angkatan I berlangsung pada tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas P3APPKB melalui seksi PUG PP bidang Kualitas Keluarga kerjasama dengan TP PKK Kota Bukittinggi ternyata mendapat tempat di hati masyarakat dan mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Maka dalam perjalanannya pelaksanaan Sekolah Keluarga di tahun 2019 lebih dikembangkan. Untuk pelaksanaan Sekolah Keluarga Angkatan II, Pemerintah Kota Bukittinggi membuat kelompok kerja untuk mengerjakan program ini secara bersama yakni melalui Tim Pembina Sekolah Keluarga Kota Bukittinggi Tahun 2019 yang terdiri dari banyak aktor yakni Walikota Bukittinggi, Wakil Walikota Bukittinggi, Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Bukittinggi beserta staf, beberapa kepala instansi (Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, Dinas Sosial Kota Bukittinggi, Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi dan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi), Ketua TP PKK Kota Bukittinggi beserta staf, ketua-ketua TP PKK Kecamatan Kota Bukittinggi, ketua-ketua TP PKK Kelurahan Kota Bukittinggi dan para Camat dan Lurah Kota Bukittinggi.

Pada tahun pelaksanaan 2018 (tahap awal), keterbatasan dalam sumber daya yang ada di seksi PUG PP bidang Kualitas Keluarga Dinas P3APPKB baik berupa dana, tenaga serta sarana dan prasarana, menyebabkan program Sekolah Keluarga dilaksanakan dengan pola kerja sama dengan berbagai pihak, baik berupa dana, sarana dan prasarana, tenaga penyelenggara serta narasumber. Pada pelaksanaan wisuda angkatan pertama pun dilangsungkan bersamaan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Kota Bukittinggi hari Pencanaan PKK KB Kes (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Keluarga Berencana dan Kesehatan) dan Peringatan Hari Ulang Tahun RRI ke-73, yang dilaksanakan pada Selasa, 4 September 2018 bertempat di Auditorium RRI Bukittinggi.⁹

Angkatan II Sekolah Keluarga dilaksanakan di tahun 2019. Program ini dilanjutkan karena dampaknya dinilai memberikan hasil yang cukup signifikan bagi pola asuh keluarga, maka pelaksanaannya dilakukan secara *massive* dan program mulai dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 alokasi pos Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.¹⁰ Selain itu mulai dari tahun 2019, pelaksanaan Sekolah Keluarga dikerjakan secara bersama melalui Tim Pembina

⁹Dokumen *Story Telling* Sekolah Keluarga., *op.cit.*

¹⁰Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sekolah Keluarga Angkatan II Tahun 2019, hlm 18

Sekolah Keluarga yang terdiri dari banyak instansi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut dampak positif Sekolah Keluarga yang dirangkum oleh Dinas P3APPKB setelah penyelenggaraan Sekolah Keluarga pada tahun 2018:¹¹

Tabel 1.3. Dampak Penyelenggaraan Sekolah Keluarga Tahun 2018

No.	Sebelum Sekolah Keluarga	Sesudah Sekolah Keluarga
1.	Pengguna narkotika yang ditangani kepolisian tahun 2017 di Kelurahan Puhun Tembok 3 kasus, Kelurahan ATTS (Aur Tajungkang Tengah Sawah) 1 kasus.	Setelah Sekolah Keluarga Kelurahan Puhun Tembok mampu menurunkan kasus narkotika menjadi 2 kasus dan Kelurahan ATTS tetap 1 kasus.
2.	Kasus kekerasan terhadap anak yang ditandatangani oleh P2TP2A sebelumnya di 3 kelurahan tahun 2017 sebanyak 10 kasus.	Setelah Sekolah Keluarga di 3 kelurahan terjadi penurunan sampai 50% yaitu 5 kasus.
3.	Masih rendahnya pengetahuan peserta tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, sehingga kasus <i>stunting</i> di Kelurahan Aur Kuning masih terdapat sekitar 23,1%.	Setelah Sekolah Keluarga terdapat penurunan kasus <i>stunting</i> di Kelurahan Aur Kuning menjadi 17,3%.

sumber: Olahan Peneliti

Tabel di atas menjelaskan dampak pelaksanaan Sekolah Keluarga di tiga (3) kelurahan yang menjadi pilot proyek pelaksanaan Sekolah Keluarga. Terjadi penurunan kasus penggunaan narkotika di Kelurahan Puhun Tembok dari 3 kasus menjadi 1 kasus, kasus kekerasan terhadap anak akumulasi 3 kelurahan dari 10 kasus menjadi 5 kasus, dan kasus *stunting* di Kelurahan Aur Kuning dari 23,1% menjadi 17,3%. Berikut adalah gambaran perkembangan permasalahan sosial di Kota Bukittinggi yang dirangkum oleh DP3APPKB Kota Bukittinggi:

¹¹Dokumen Inovasi Pelayanan Publik “Kolega Sejati”, *op.cit.*, hlm 29-31

Tabel 1.4 Perkembangan Permasalahan Sosial Kota Bukittinggi

No.	Masalah	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Kasus <i>Human Immunodeficiency Virus (HIV) / Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)</i>	71 kasus	75 kasus
2.	Kekerasan pada perempuan dan anak	48 kasus	55 kasus
3.	Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)	59 orang	- (belum diupdate DP3APPKB)
4.	Lelaki Suka Lelaki (LSL) yang ke pelayanan kesehatan	48 orang	36 orang
5.	Perceraian suami isteri	576 perkara	672 perkara
6.	<i>Stunting</i>	24,4%	21,47%

Sumber: Dokumen Inovasi Pelayanan Publik “Kolega Sejati” dan Data DP3APPKB

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa secara umum dari lima (5) permasalahan sosial yang telah diperbaharui oleh Dinas P3APPKB, ternyata tiga (3) diantaranya masih mengalami peningkatan kasus. Permasalahan sosial Kota Bukittinggi yang mengalami peningkatan kasus berdasarkan tabel di atas adalah HIV/AIDS dari 71 kasus menjadi 75 kasus, kekerasan pada perempuan dan anak dari 48 kasus menjadi 55 kasus dan perceraian suami istri dari 576 kasus menjadi 672 kasus.

Berdasarkan tabel 1.2 dan 1.3 di atas dapat kita lihat bahwa dampak pelaksanaan Sekolah Keluarga secara angka dan persentase belum membawa dampak yang signifikan terhadap permasalahan sosial yang ada di Kota Bukittinggi. Namun bagi kelurahan yang menjadi lokasi pelaksanaan Sekolah Keluarga, manfaat atau dampak pelaksanaan Sekolah Keluarga sudah cukup terasa.

Pelaksanaan program ini cukup mendapat respon positif dari peserta. Walaupun pada awal penyelenggaraan sekolah, banyak tantangan terutama dari pandangan pesimis masyarakat terhadap program Sekolah Keluarga ini, dan ada

peserta yang mengaku malas untuk mengikuti rutinitas mingguan untuk proses pembelajaran di Sekolah Keluarga. Namun pada akhirnya mereka cukup menaruh minat setelah melihat materi yang disampaikan. Hal ini terlihat saat pelaksanaan wisuda, para peserta per kelurahan berinisiatif menggunakan seragam dan aksesoris selayaknya wisuda pada umumnya. Yang mana DP3APPKB maupun TP PKK Kota Bukittinggi tidak menganggarkan biaya untuk seragam wisuda bagi peserta Sekolah Keluarga.

Gambar 1.2 Wisuda Sekolah Keluarga Angkatan II



sumber: Olahan Peneliti

Gambar di atas merupakan foto bersama pada pelaksanaan Wisuda Sekolah Keluarga Angkatan II. Dari gambar 1.2 dapat dilihat di beberapa kelurahan penyelenggara Sekolah Keluarga, pesertanya memakai seragam dalam pelaksanaan Wisuda Sekolah Keluarga. Namun hal yang masih disayangkan pada pelaksanaan Sekolah Keluarga yang ikut terlihat pada gambar tersebut adalah peserta yang masih didominasi oleh perempuan atau ibu-ibu. Untuk tahun 2021, Pemko Bukittinggi berencana membuat satu kelas khusus untuk laki-laki atau

bapak-bapak, agar bapak-bapak lebih nyaman dan leluasa dalam menimba ilmu melalui Sekolah Keluarga.

Dalam pelaksanaan mekanisme pelaksanaan Sekolah Keluarga, pada *survey* awal penelitian, peneliti menemukan bahwa pada implementasi Sekolah Keluarga tahun 2019, ada beberapa kelurahan yang tercatat sebagai Kampung KB yang tidak menjadi lokasi pelaksanaan Sekolah Keluarga. Berikut gambarannya:

Tabel 1.5 Daftar Kelurahan di Kota Bukittinggi

No.	Kelurahan	Kecamatan	2018	2019	Ket.
1.	Campago Ipuh	Mandiangan Koto Selayan (MKS)		✓	
2.	Campago Guguk Bulek	MKS			
3.	Kubu Gulai Bancah	MKS			
4.	Puhun Tembok	MKS	✓	✓	
5.	Puhun Pintu Kabun	MKS		✓	
6.	Manggih Ganting	MKS		✓	
7.	Pulai Anak Air	MKS		✓	
8.	Garegeh	MKS			
9.	Koto Selayan	MKS			
10.	Kayu Kubu	Guguk Panjang (GP)		✓	
11.	Pakan Kurai	GP		✓	
12.	Benteng Pasar Atas	GP			
13.	Bukit Cangang Kayu Ramang	GP			
14.	Aur Tajungkang Tengah Sawah	GP	✓	✓	
15.	Tarok Dipo	GP		✓	
16.	Bukit Apit Puhun	GP			
17.	Belakang Balok	Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB)			
18.	Birugo	ABTB		✓	
19.	Aur Kuning	ABTB	✓	✓	
20.	Sapiran	ABTB			
21.	Kubu Tanjung	ABTB			
22.	Pakan Labuah	ABTB			
23.	Ladang Cakiah	ABTB		✓	
24.	Parit Antang	ABTB			

sumber: olahan peneliti dari DP3APPKB

Keterangan:

ditandai kuning = kampung KB

ditandai merah = kampung KB, tapi tidak menjadi peserta Sekolah Keluarga sampai tahun 2019

ditandai hijau = bukan kampung KB, tapi menjadi peserta Sekolah Keluarga di tahun 2019

Berdasarkan tabel di 1.5 dapat dilihat bahwa Kelurahan Belakang Balok dan Kelurahan Pakan Labuah yang dikategorikan sebagai Kampung Keluarga Berencana (KB) tidak menjadi lokasi pelaksanaan Sekolah Keluarga, sedangkan Kelurahan Campago Ipuh, Pakan Kurai, Tarok Dipo dan Birugo yang tidak masuk kategori Kampung KB mendapat kesempatan untuk menjadi lokasi pelaksanaan Sekolah Keluarga pada tahun pelaksanaan 2019.

Keberhasilan Pemko Bukittinggi dirikan Sekolah Keluarga mendapat perhatian dari daerah lain. Pada akhir tahun 2018 Pemerintah Kota Solo turut mengagagas pelaksanaan Sekolah Keluarga di daerahnya.¹² TP PKK Kota Makassar juga telah melakukan kunjungan kerja ke Pemko Bukittinggi pada tanggal 2 Mei 2018 dalam rangka mempelajari Program Sekolah Keluarga sebagai program terbaik dari Kota Bukittinggi.¹³ Berikutnya diikuti dengan kunjungan Pemerintah Kota Bengkulu ke Pemerintah Kota Bukittinggi pada tanggal 24 Oktober 2019 dalam rangka studi banding mengenai inovasi Sekolah Keluarga yang telah dilakukan di Bukittinggi yang dirasa sinkron dengan visi misi Kota Bengkulu, untuk menjadikan masyarakatnya berdaya dan bahagia.¹⁴

Secara peraturan, keberlangsungan inovasi ini telah dituangkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan seperti Surat Keputusan Walikota maupun berupa Petunjuk Teknis yang dijabarkan sebagai berikut:

¹² Republika.co.id 2018, 26 Desember. *Pemkot Solo Gagas Sekolah Keluarga*. (<https://www.republika.co.id>), diakses pada 29 November 2019.

¹³ Padang Ekspres. 2018, 3 Mei. *TP PKK Makassar Pelajari Sekolah Keluarga Bukittinggi*. (<https://padek.co>), diakses pada 29 November 2019.

¹⁴ SumbarPos. 2019, 24 Oktober. *Sukses Dirikan Sekolah Keluarga Pemko Bengkulu Kunjungi Bukittinggi*. (<http://sumbarpos.com>), diakses pada 13 Maret 2020.

1. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 188.45-15-2018 tentang Penetapan Kelurahan Penyelenggara Sekolah Keluarga di Kota Bukittinggi Tahun 2018
2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sekolah Keluarga Angkatan II Tahun 2019
3. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 188.45-23-2019 tentang Penetapan Kelurahan Penyelenggara Sekolah Keluarga di Kota Bukittinggi Tahun 2019
4. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 188.45-107-2019 tentang Pembentukan Tim Pembina Sekolah Keluarga di Kota Bukittinggi Tahun 2019-2021

Dari penjabaran di atas dapat kita lihat bahwa pelaksanaan Sekolah Keluarga melibatkan banyak pihak. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan begitu, sangat penting kejelasan tujuan dan tanggung jawab berikut ketepatan komunikasi antar pelaksana.

Sumber Daya Manusia yang dilibatkan dalam pemberian materi Sekolah Keluarga menjadi aspek yang memiliki pengaruh besar dalam keberhasilan program ini. Apakah narasumber benar-benar mampu menyampaikan materi yang telah ditetapkan kepada peserta Sekolah Keluarga. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan peserta sehingga nantinya mendorong peningkatan sikap dan perilaku peserta dalam pengasuhan anak dan ketahanan keluarga. Artinya, narasumber program ini harus benar-benar handal dan mampu mentransfer ilmu kepada peserta ajarnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti program Sekolah Keluarga yang kini menjadi program unggulan Pemerintah Kota

Bukittinggi dimana program ini mendapat respon positif dari berbagai pihak. Peneliti ingin melihat implementasi program Sekolah Keluarga Kota Bukittinggi dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana pemerintah daerah dalam menggerakkan dan menjalankan program inovasi yang mereka canangkan.

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah Kota Bukittinggi melalui inovasinya melalui program Sekolah Keluarga dalam upaya menyelesaikan permasalahan publik telah melahirkan program yang dinilai positif. Pelaksanaan Sekolah Keluarga di tahun pertama yang minim sumber daya terus diperbaiki dengan tujuan mewujudkan ketahanan keluarga maka rumusan masalah yang peneliti kemukakan adalah:

Bagaimana Implementasi Program Sekolah Keluarga di Kota Bukittinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program Sekolah Keluarga di Kota Bukittinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Sebagai bahan kajian dalam studi Administrasi Publik khususnya bidang kinerja implementasi kebijakan. Bahan informasi untuk memperkaya literatur khazanah kepustakaan dibidang kebijakan publik.

2. Sebagai sumbangan referensi dan sumbangan informasi komparatif bagi peneliti lain yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah:

1. Sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan dan sarana pelatihan bagi peneliti dalam menganalisa permasalahan yang muncul di kalangan masyarakat berkaitan dengan kebijakan.
2. Menjadi bahan masukan, pertimbangan dan acuan bagi instansi terkait terutama Dinas P3APPKB serta Pemerintah Kota Bukittinggi terkait penyelenggaraan Sekolah Keluarga.

